BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Nanggroe Aceh Darussalam atau lebih dikenal dengan sebutan Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masyarakatnya bersifat multietnis. Aceh yang berdiri pada 7 Desember 1956 beribukota di Banda Aceh. Provinsi ini memiliki Luas wilayah 57.365,57 km^2 (2,88% dari luas Indonesia) dan terletak pada posisi 2° - 6° Lintang Utara dan 95° - 98° Bujur Timur. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggali di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Pelabuhannya adalah Malahayati-Krueng Raya, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa (http://www.nad.go.id).

Berbicara mengenai Aceh, tidak lepas dari sejarah dan kejayaan serta konflik internal yang terjadi di sana. Pada jaman dahulu Aceh pernah menjadi salah satu wilayah yang terkenal dengan pusat komoditi hasil pertanian dan perkebunan dimana lada sebagai komoditi utama Kerajaan Aceh pada waktu itu. Terlepas dari itu, Aceh juga mengalami masa-masa suram ketika munculnya pemberontakan seperti Pemberontakan DI/TII (1953-1969) hingga munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang secara tegas bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Belum selesai masalah GAM dengan pemerintah Indonesia, Aceh diterpa oleh musibah yang sangat dahsyat. Tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004,

terjadi gempa bumi yang cukup kuat diikuti gelombang tsunami yang memporak-porandakan pesisir barat Aceh sepanjang 800 km.

Gelombang tsunami adalah gelombang laut yang bergerak dengan cepat yang disebabkan oleh adanya tekanan di lautan. Pemicunya bisa terjadi akibat adanya gempa bumi, letusan gunung berapi atau tumbukan meteorit. Istilah tsunami digunakan untuk sebutan gelombang pasang. Gelombang tsunami berbeda dengan gelombang yang dihasilkan oleh angin yang secara teratur bergulung menuju pantai. Tsunami memiliki panjang gelombang (dari satu puncak gelombang ke gelombang lainnnya) lebih dari 100 km. Gelombang tersebut bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di kedalaman Lautan Pasifik, kecepatannya bisa mencapai 800 km/jam. Jika gempa terjadi di Los Angeles, tsunami akan menghantam Tokyo lebih cepat dibandingkan dengan perjalanan menggunakan pesawat bermesin jet sekalipun. Tsunami meninggalkan perairan dalam menuju ke perairan terbuka yang lebih dangkal seperti halnya gelombang biasa. Hanya saja gelombang tsunami memiliki kekuatan yang jauh lebih besar bahkan dapat mencapai ketinggian 30 meter di atas permukaan laut (Pikiran Rakyat, 27 Desember 2004).

Bencana tsunami yang terjadi pada hari Minggu pagi tersebut benar-benar mengguncang wilayah Asia, Afrika dan juga dunia. Tidak hanya Indonesia yang mengalami kerusakan akibat gempa berkekuatan 8,9 Skala Ritcher dengan episentrum yang berada di sekitar Meulaboh itu, tetapi juga negara-negara yang terletak di wilayah Teluk Benggali hingga ke Benua Afrika.

Aceh merupakan salah satu wilayah yang menderita kerusakan yang parah dimana gelombang tsunami tersebut menurut data Lembaga Informasi Nasional (LIN) mengakibatkan setidaknya 173.741 jiwa meninggal dunia dan sebanyak 114.897 lainnya dinyatakan hilang dan jumlah pengungsi sampai Jumat 7 Januari 2005 pukul 20.00 WIB, diperkirakan lebih dari 544.927 orang yang tersebar di beberapa tempat (http://www.kapanlagi.com/h/0000051433.html).

Selain itu, gelombang tsunami ini juga menghancurkan sebagian besar insfrastruktur, pemukiman, sarana sosial seperti gedung sekolah, ekonomi dan lain-lain. Bencana itu juga mempengaruhi kondisi sosial politik masyarakat Aceh, termasuk dampak psikologisnya. Seperti telah kita ketahui bersama, sektor ekonomi termasuk sektor yang paling parah dihantam oleh tsunami. Imbas kerusakan itu terlihat pada bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian dan kehutanan, perikanan dan kelautan serta ketenagakerjaan. Perekonomian masyarakat lumpuh total dan butuh beberapa tahun untuk memulihkannya dan menjadikannya seperti semula. Tingkat kerusakan yang parah terjadi pada industri kecil menengah, dimana tingkat kerusakannya mencapai 65%, hal ini dimaklumi karena sektor inilah yang menjadi garapan sebagian besar masyarakat Aceh. Sementara pada industri besar, tingkat kerusakannya sekitar 60% (Majalah Nangroe, edisi November 2005).

Kerusakan yang parah juga terjadi pada sektor perdagangan. Data yang tercatat pada Buku Utama Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) menyebutkan, bahwa fasilitas perdagangan di Aceh yang diperkirakan mengalami kerusakan meliputi 65 kelompok pertokoan, 54 pasar permanen, 69 pasar non

permanen, 69 Supermarket, 1 pasar hewan, 19 pasar ikan, 25 bank umum, dan 4 Bank Perkreditan Rakyat. Kerusakan juga menimpa 59 hotel dan tempat penginapan serta usaha kecil yang bergerak di bidang perkayuan, kulit, besi, keramik, pakaian dan pengolahan makanan. Sementara dalam bidang pertanian dan kehutanan yang menjadi areal tanaman pangan dan holtikultura yang diusahakan oleh rakyat juga mengalami kerusakan. Ada 23.330 ha sawah dan 22.785 ha lahan tegalan yang rusak.

Siaran pers *Media Centre* LIN yang bersumber dari Sekretariat Wakil Presiden dalam memorandum No.9 dan 10, tercatat kerusakan sarana pendidikan sebanyak 914 Gedung SD, 155 Gedung SMP, 67 Gedung SMA, dan 16 Gedung SMK. Sarana kesehatan yang rusak sebanyak 240 yang terdiri dari 8 Rumah Sakit dan 232 Puskesmas. Jumlah perkantoran yang rusak adalah sebanyak 1.644, terdiri dari 1 Kantor Gubernur, 4 Kantor Bupati, 56 Kantor Camat, 1.550 Kantor Desa, dan 27 Kantor Polisi. Jalan dan jembatan yang rusak sepanjang 6.286 km yang terdiri dari jalan 423 km nasional, 2.191 km jalan propinsi, 32.270 km jalan kabupaten/kota dan 18.761 km jembatan (http://www.tokohindonesia.com).

Sementara itu, sampai akhir April 2005, Pemerintah Indonesia melaporkan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh mencapai total Rp 43,5 Trilyun atau US$ 4,57 Milyar. persentase penduduk yang kehilangan mata pencaharian 44%, tingkat kerusakan pada berbagai aspek seperti ekonomi dan sosial sebesar $1,657 juta, infrastruktur (transportasi, komunikasi, energi, air dan sanitasi serta saluran irigasi) $877 juta, produktif (pertanian, perikanan, industri dan pertambangan) $1,182 juta, lintas sektoral (lingkungan,

pemerintahan, bank dan keuangan) sebesar $652 juta, dan lain sebagainya (http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/KHII-6C83QB).

Indonesia dan Aceh khususnya mengakhiri tahun 2004 untuk memulai tahun 2005 dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Dengan adanya bencana tsunami ini, Aceh seakan menjadi sebuah kota yang mati. Akibatnya, masyarakat Aceh tidak dapat bekerja atau melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, selain karena situasi pasca tsunami juga karena adanya rasa traumatik yang mendalam pada masyarakat Aceh.

Melihat kondisi Aceh seperti itu, tentu proses rekonstruksi terutama dalam hal infrastruktur di Aceh akan membutuhkan biaya yang sangat besar dan memakan waktu yang cukup lama. Pasca tragedi tsunami tersebut, Pemerintah Indonesia dengan segera berupaya untuk memulihkan kondisi Aceh. Mulai dari pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, fasilitas-fasilitas umum serta berupaya untuk menumbuhkan kembali kegiatan perekonomian.

Telah banyak bantuan yang diterima oleh Aceh dalam upaya pemulihannya baik berupa bantuan dana ataupun juga bantuan langsung melalui sukarelawan-sukarelawan yang datang ke Aceh. Semua itu adalah reaksi kemanusiaan yang normal dan menunjukkan solidaritas internasional bagi negara yang terkena dampak bencana alam itu. Pasca tsunami, sekitar 150 negara mengirim perwakilannya ke Aceh. Sampai Maret 2005 tercatat sebanyak 7.000 orang asing tersebar di Aceh dengan tugas sebagai relawan kemanusiaan (http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/11/Wisata/1793918.htm).

Uni Eropa (UE) merupakan salah satu dari sekian banyak organisasi serta negara-negara yang berkomitmen untuk memberikan bantuan terhadap bencana yang terjadi di kawasan Asia Tenggara termasuk Aceh. Untuk diketahui bahwa UE adalah pemberi bantuan dana terbesar di dunia untuk operasi-operasi kemanusiaan. Melalui Komisi Eropa untuk Bantuan Kemanusiaan atau *European Community Humanitarian aid Office* (ECHO) yang merupakan departemen dalam Komisi Eropa yang khusus mengurusi bantuan kemanusiaan yang didanai oleh UE. ECHO berada di bawah tanggung jawab Komisioner Louise Michel dan memiliki mandat untuk melakukan operasi-operasi kemanusiaan di seluruh belahan dunia. Operasi-operasi tersebut mencakup penilaian kebutuhan kemanusiaan di daerah bencana, alokasi dana yang sesuai untuk barang dan jasa seperti makanan, tempat penampungan, bantuan medis, pasokan air, sanitasi atau perbaikan darurat dan evaluasi dampak bantuan yang diberikan. Persiapan menghadapi bencana dan proyek-proyek untuk mengurangi resiko di daerah-daerah yang rawan bencana alam juga merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan penyelamatan yang dibiayai oleh Komisi Eropa melalui ECHO (http://www.kompas.com/utama/news.htm).

Komisi Eropa telah menyalurkan dana sebesar 123 juta euro sebagai upaya tanggap awal bantuan kemanusiaan untuk kawasan yang dilanda bencana gempa bumi dan gelombang tsunami seperti Maladewa, Thailand, India dan tentunya Indonesia. Untuk Indonesia sendiri, Komisi Eropa telah memberikan dana bantuan kemanusiaan sebesar 60 juta Euro. Dana tersebut telah digunakan untuk membiayai berbagai macam kegiatan, antara lain sistem peringatan dini epidemik,

layanan kesehatan dasar dan bantuan psikososial, penelusuran dan penyatuan kembali anak-anak yang terpisah dari keluarganya, fasilitas air bersih dan sanitasi, peningkatan kondisi kehidupan penduduk yang tinggal di pusat-pusat penampungan pengungsi, pemulihan kembali kegiatan nelayan dan petani, bantuan logistik untuk tindakan-tindakan darurat di Aceh, layanan telfon satelit ketika layanan telfon umum belum berfungsi (http://www.delidn.ec.europa.eu).

Namun bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa tidak hanya cukup sampai disitu saja. Mengingat bahwa kehidupan masyarakat baik dalam bidang perekonomian maupun kesejahteraan serta infrastruktur penunjangnya merupakan salah satu modal penting dari proses pembangunan dalam suatu negara. Apa yang terjadi di Aceh seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dampak yang diakibatkan oleh bencana tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 mengakibatkan kerusakan dan juga kerugian yang sangat besar bagi Indonesia. Proses rekonstruksi sesegera mungkin terutama dalam sektor infrastruktur masyarakat adalah solusi yang utama dalam kasus bencana Aceh. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa dalam proses rekonstruksi ini mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri melainkan butuh kerjasama serta bantuan dari negara lain. Begitupun juga dengan Pemerintah Indonesia, dalam pelaksanaan proses pemulihan tersebut Indonesia juga membutuhkan bantuan dari dunia internasional baik dari negara-negara ataupun organisasi-organisasi internasional.

Sebagai sebuah organisasi yang sangat peduli terhadap masalah kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, UE

melalui Komisinya turut pula memberikan bantuan yang diproyeksikan untuk pemulihan jangka panjang bagi wilayah Aceh. Paket bantuan sebesar $242.430.000 pada tahap awal akan disalurkan melalui *Multi Donor Trust Fund for Aceh and North Sumatera* (MDTFANS) dan akan bertambah jumlahnya terutama untuk proses rekonstruksi dalam jangka waktu ke depan (http://www.ec.europa.eu/echo/whatsnew/tsunami).

MDTFANS merupakan sebuah lembaga sementara yang bertugas untuk mengelola dan mengkoordinasikan bantuan-bantuan yang diterima oleh pihak Indonesia dalam rangka pemulihan wilayah-wilayah yang terkena dampak dari tsunami pada tahun 2004. Banyaknya jumlah bantuan yang diterima oleh pemerintah Indonesia, tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengelola dana bantuan tersebut sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *World Bank* dan atas usulan dari pihak Uni Eropa akhirnya mendirikan MDTFANS pada bulan April 2005. MDTFANS itu sendiri terdiri dari negara-negara donor kemanusiaan untuk Aceh yang terdiri dari 12 negara dan 3 organisasi yang termasuk di dalamnya adalah Uni Eropa. Mereka berwenang untuk menentukan serta merencanakan proyek rekonstruksi di Aceh dan Sumatera Utara, mendukung program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk upaya pemulihan wilayah yang dilanda bencana tsunami. Sebagai donor terbesar untuk MDTFANS, Uni Eropa kemudian ditunjuk sebagai satu dari tiga ketua yang ada dalam *steering committee* MDTFANS.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“ **Peranan Uni Eropa melalui Kerangka *Multi Donor Trust Fund for Aceh and North Sumatera (MDTFANS)* dalam Membantu Proses Rekonstruksi Aceh Pasca Bencana Tsunami 2004 ”.**

Ketertarikan penulis terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa matakuliah pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, antara lain :

1. Hubungan Internasional di Eropa, yang menguraikan fakta-fakta sejarah diplomasi yang terkait serta berbagai perkembangan yang sudah atau yang masih berlangsung dewasa ini di kawasan Eropa.
2. Organisasi dan Administrasi Internasional, yang mempelajari organisasi internasional sebagai aktor internasional dengan *international legal personality*. Dan membagi organisasi berdasarkan klasifikasi-klasifikasi yang ada. Dalam hal ini membantu dalam mempelajari struktur ataupun fungsi-fungsi yang ada dalam Uni Eropa sebagai organisasi internasional.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu tahap permulaan dari penguasaan dimana suatu objek dalam suatu jalinan situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah (Suriasumantri, 1996: 309).

Bencana tsunami yang melanda wilayah barat Indonesia, khususnya wilayah Aceh pada tanggal 26 Desember 2004, mengakibatkan lebih dari

150.000 orang meninggal dunia dan puluhan ribu lainnya dinyatakan hilang. Aceh menjadi sebuah kota mati, dimana hampir semua fasilitas umum dan perumahan penduduk hancur. Lebih dari 2000 fasilitas pendidikan hancur serta tidak kurang dari 122 fasilitas pelayanan kesehatan rusak yang diantaranya adalah puskesmas dan rumah sakit. Kegiatan perekonomian di Aceh lumpuh total setelah gelombang tsunami masuk ke daratan.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini dengan segera berupaya untuk menanggulangi dampak dari bencana tsunami. Melalui Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP) serta organisasi-organisasi lokal yang ada mulai memberikan bantuan pada korban bencana. Namun Pemerintah Indonesia menyadari bahwa dalam proses rekonstruksi infrastruktur di Aceh, mereka tidak bisa mengatasinya sendiri mengingat begitu parahnya kerusakan, besarnya kerugian yang diderita serta banyaknya korban yang diakibatkan oleh bencana tsunami terbesar abad ini yang melanda Aceh. Sebagai sebuah negara yang masih berkembang, Indonesia memiliki keterbatasan baik dalam segi biaya dan juga waktu pemulihan. Disamping itu, Pemerintah Indonesia juga masih memiliki hutang luar negeri yang jumlahnya cukup besar, akumulasi dari hutang Pemerintah Indonesia pada tahun 2005 adalah sebesar Rp. 570.584,26 juta dan berkembang sampai awal tahun 2006 menjadi sebesar Rp. 589.190,27 juta, jumlah hutang ini semakin mempersulit Pemerintah Indonesia untuk segera melaksanakan pemulihan kondisi Aceh (http://www.sinarharapan.co.id/berita).

Sebagai bentuk solidaritas internasonal serta adanya kerjasama yang dijalin antara Pemerintah Indonesia dengan dunia internasional, telah banyak bantuan yang datang untuk bersama-sama berupaya untuk memulihkan kondisi Aceh. Banyaknya jumlah bantuan yang datang dari berbagai negara, organisasi nasional maupun internasional ternyata menimbulkan kesulitan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia untuk mengkoordinasikan dana bantuan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *World Bank* dan Uni Eropa sebagai salah satu kontributor dana terbesar untuk membentuk lembaga bernama MDTFANS yang bertugas untuk mengelola dana bantuan dan merencanakan serta mengkoordinasikan berbagai program untuk pembangunan jangka panjang di Aceh dan Sumatera Utara.

Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, maka peneliti merangkumnya dalam beberapa pertanyaan :

1. Proyek apakah yang dicanangkan oleh pihak Uni Eropa melalui kerangka MDTFANS dalam upaya rekonstruksi di Aceh pasca bencana tsunami?
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk membantu pelaksanaan proyek tersebut?
3. Sejauhmana keberhasilan pelaksanaan proyek tersebut?
4. Bagaimanakah prospek Aceh pasca berakhirnya masa kerja MDTFANS?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan dengan jelas yang memungkinkan kita untuk mendefinisikan faktor mana saja yang masuk ke dalam lingkup permasalahan dan faktor mana saja yang tidak (Suriasumantri, 1996: 311).

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan pada pemberian bantuan dana yang diberikan oleh Uni Eropa melalui kerangka MDTFANS pada proyek-proyek rekonstruksi yang dilaksanakan di Aceh selama kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Pembatasan waktu dilakukan untuk menghindari luasnya rentang waktu yang diteliti sehingga mempermudah penelitian.

1.2.3 Perumusan Masalah

Untuk memudahkan penulisan yang didasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka penulis mengajukan perumusan masalah sebagai berikut :

“ Bagaimana peran Uni Eropa melalui kerangka MDTFANS dapat membantu proses rekonstruksi di Aceh pasca bencana tsunami pada tahun 2004?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Uni Eropa melalui kerangka MDTFANS dalam membantu proses rekonstruksi di Aceh pasca bencana tsunami pada tanggal 26 Desember 2004.
b. Untuk mengetahui respon dari Pemerintah Indonesia terhadap proyek yang dicanangkan oleh MDTFANS.
c. Untuk mengetahui bagaimana kondisi Aceh pasca dilaksanakannya proyek dari MDTFANS dalam membantu proses rekonstruksi di Aceh.
d. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Indonesia dan Aceh khususnya dalam upayanya untuk membangun kembali Aceh pasca masa kerja MDTFANS berakhir.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai penanganan korban serta pemulihan infrastruktur yang diakibatkan oleh bencana alam yang terjadi di Indonesia khususnya bencana alam tsunami.
b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan muncul pemikiran-pemikiran yang berkembang sesuai dengan pelaksanaan yang telah dicapai serta perkembangan dan kejadian terakhir di lapangan. Dengan kata lain, hasil dari penelitian ini nantinya mampu memberikan sumbangan

pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hubungan internasional.

c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan penjelasan, gambaran dan pengetahuan bagi berbagai pihak yang berminat atau yang sedang mangadakan penelitian mengenai penanganan korban serta kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Konseptual

Pada dasarnya hubungan internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lainnya. Dalam kenyataanya hubungan internasional tidak terbatas hanya pada hubungan antar negara saja, tetapi juga merupakan hubungan antar individu dengan kelompok kepentingan, sehingga negara tidak selalu menjadi aktor utama tetapi merupakan aktor yang rasional yang dapat melakukan hubungan melewati batas negara.

Gambaran yang menunjukkan bahwa hubungan internasional meliputi interaksi antar *state actors* maupun *non-state actors* dalam sistem internasional adalah sebagai berikut :

> Istilah hubungan internasional berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara baik yang dilakukan oleh pemerintahan atau warga negara. Pengkajian hubungan internasional, termasuk di dalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional dan meliputi segala segi hubungan di antara berbagai negara di dunia (Holsti, 1992: 26-27).

Adanya suatu bentuk interaksi yang dilakukan oleh masing-masing negara akan menghasilkan konsep kerjasama internasional. Kerjasama

internasional juga timbul akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Tidak ada suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar dan konsep kerjasama internasional merupakan solusi dari adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh negaranya sendiri. Kerjasama internasional itu dapat merupakan kerjasama antara pemerintah-pemerintah nasional suatu negara dan aktor-aktor lain yang melewati batas suatu negara (Brown, 1992: 29).

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung terwujudnya suatu bentuk kerjasama internasional, yang diantaranya adalah:

1. Kemajuan di bidang teknologi yang memudahkan terjalinnya hubungan yang dapat dilakukan negara-negara, sehingga meningkatnya ketergantungan satu sama lain.
2. Kemajuan serta perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara.
3. Perubahan sifat perang dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi atau membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.
4. Adanya kesadaran dan keinginan berorganisasi merupakan salah satu metode kerjasama internasional (Rudi, 1998: 22).

Kerjasama internasional dapat diwujudkan dalam suatu organisasi yang disebut dengan organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan wadah pertemuan negara-negara dalam menyatukan masing-masing

kepentingan menjadi sebuah kesepakatan internasional yang merupakan suatu bukti dari adanya *National Understanding*.

Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Perwita&Yani, 2005: 92).

Pengertian lain dari organisasi internasional adalah sebagai berikut :

> Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu ikatan formal yang melampaui batas wilayah nasional. Dari ikatan formal ini kemudian dibentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka baik dalam bidang keamanan, sosial dan ekonomi serta bidang lainnya. Beberapa pendukung organisasi internasional berpendapat bahwa terbentuknya lembaga ini memberikan sarana atau media bagi suatu negara untuk menjangkau berbagai kepentingannya (Plano&Olton, 1999: 271).

Organisasi internasional akan lebih lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai berikut :

> Organisasi internasional adalah suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2002: 93-94).

Terdapat dua tipe dari organisasi internasional, yaitu organisasi antar pemerintahan (IGO) dan organisasi non-pemerintahan (NGO). Perbedaannya terletak pada apakah organisasi internasional itu dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian antar pemerintahan atau tidak (Archer, 1984: 66).

Secara khusus, organisasi antar pemerintahan (IGO) didefinisikan dari struktur dan ketetapan-ketetapan; bertemu secara relatif dalam interval tertentu;

mempunyai prosedur khusus dalam pengambilan keputusan; dan mempunyai staf-staf sekretariat atau markas besar permanen. Sistem global memberi peranan yang besar bagi institusi pemerintahan dibanding dengan kasus biasanya. Negara merupakan pusat dari aktivitas politik dalam dunia modern, dan IGO saat ini membawa kepentingan mereka dari karakternya masing-masing sebagai sekumpulan negara-negara. Tapi mereka mempunyai tujuan dan anggota yang sangat luas (Jacobson, dalam Kegley&Wittkopf, 1995: 152).

Berdasarkan keanggotaannya, IGO dapat diklasifikasikan atas empat kategori, yaitu :

1. Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum, memiliki ruang lingkup global dan melakukan berbagai fungsi seperti keamanan, kerjasama, sosial, ekonomi dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), contohnya PBB.
2. Organisasi yang keanggotaannya umum dan tujuannya terbatas, organisasi ini dikenal juga sebagai organisasi fungsional karena bergerak dalam satu bidang yang spesifik, contohnya WHO, UNICEF, FAO.
3. Organisasi yang anggotanya terbatas dan tujuannya bersifat umum, organisasi ini merupakan organisasi regional yang memiliki fungsi dan tanggung jawab keamanan, poltik, sosial, ekonomi berskala luar, contohnya ASEAN dan Uni Eropa.
4. Organisasi yang anggota dan tujuannya bersifat terbatas, organisasi ini terbagi atas organisasi sosial, ekonomi dan militer, contohnya NATO.

Uni Eropa (UE) merupakan organisasi supranasional, dimana setiap negara anggotanya menyerahkan sebagian dari kedaulatannya kepada lembaga ini. Mereka bekerja keras atas dasar kepentingan bersama melalui administrasi serta kekuasaan yang berdaulat. Kekuasaan yang dijalankannya dengan membuat keputusan berdasarkan suara mayoritas yang mengikat semua negara anggota atau warga negaranya. Supranasionalisme mencakup pengalihan wewenang *decission maker* dari negara tertentu kepada lembaga terpusat, keputusan dapat dibuat baik oleh perwakilan negara anggota atau oleh sebuah lembaga yang berfungsi sebagai unit integral dari lembaga internasional tersebut.

UE memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan model-model nasional atau internasional yang telah ada. Dibandingkan dengan Amerika Serikat misalnya, UE dibentuk berdasarkan antar negara berdaulat bukan berdasarkan konstitusi. Sedangkan dibandingkan dengan organisasi internasional yang lain, UE memiliki kekuatan untuk memberlakukan hukum yang mengikat seluruh warga yang menetap di wilayah UE.

Lembaga-lembaga UE saling mengisi satu sama lain. Masing-masing mempunyai bagian untuk bermain dalam proses pengambilan keputusan. Dewan merupakan representasi pemerintah negara anggota dan parlemen dipilih langsung oleh warga negara. Lembaga-lembaga yang ada di dalam UE adalah: *European Parliament, European Council, The Council of Ministers, European Commission, Minister of Foreign Affairs, The Court of Justice of*

The European Union, European Central Bank, Court of Auditors, Committee of the Regions, European Economics and Social Comittee.

European Commission (Komisi Uni Eropa) merupakan lembaga eksekutif UE yang membuat usulan kebijakan dan langkah-langkah menyangkut kepentingan UE, dan mewakili kepentingan UE dalam negosiasi dengan negara-negara lain. Tugas utamanya adalah membuat rancangan undang-undang yang menjadi perlindungan perjanjian UE dan melaksanakan kebijakan dan kegiatan UE.

Setiap organisasi internasional tentunya dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan peran-peran sesuai dengan tujuan pendirian organisasi internasional tersebut oleh para anggotanya.

Fungsi utama dari organisasi internasional adalah untuk memberikan makna dari kerjasama yang dilakukan antara negara-negara dalam dalam satu area, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan untuk negara-negara yang terlibat di dalamnya (Bennet, 1995: 3).

Selanjutnya Clive Archer mengemukakan adanya sembilan fungsi organisasi internasional yaitu artikulasi dan agregasi kepentingan nasional negara-negara anggota, menghasilkan norma-norma (rejim), rekrutmen, sosialisasi, pembuatan keputusan (*rule making*), penerapan keputusan (*rule application*), penilaian atau penyelarasan keputusan (*rule adjunction*), tempat memperoleh informasi, dan operasionalisasi antara lain dengan melaksanakan pelayanan teknis serta penyedia bantuan (1983: 152).

Dalam menjalankan fungsi operasionalisasinya sebagai penyedia bantuan, UE telah banyak memberikan bantuan baik dari segi pendanaan ataupun juga lainnya dalam menanggapi masalah bencana kemanusiaan di

dunia. Sampai dengan saat ini UE merupakan donatur terbesar bagi kegiatan kemanusiaan di seluruh dunia. UE melalui Komisi Eropa telah pula memberi bantuan luar negeri bagi bencana-bencana besar yang terjadi selama 2004-2006 melalui berbagai program pendanaan dan dukungan, dengan memberikan juga dana tambahan yang disalurkan melalui upaya multi-donor agar meningkatkan koordinasi antar donor dan penyelarasan bantuan. Sebagai kontributor utama *Multi Donor Fund for Aceh and North Sumatera* (MDTFANS), Komisi Eropa bertindak sebagai salah satu ketua untuk membantu koordinasi pendanaan bagi rekonstruksi Aceh dan Nias di berbagai sektor menyusul terjadinya gempa bumi dan tsunami. Hingga tahun 2008, MDTFANS telah berhasil mengumpulkan dana sebesar $704.06 juta, dimana termasuk didalamnya kontribusi dari Komisi Eropa sebesar $282.240 juta.

Pengertian bantuan luar negeri adalah :

> Pemindahan keuangan, barang atau bantuan teknis dari negara donor kepada negara penerima bantuan yang merupakan salah satu informasi dalam kebijaksanaan luar negeri yang telah digunakan dalam hubungan internasional selama berabad-abad (Holsti, 1992: 321).

Secara umum bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah lain yang dapat berbentuk barang atau dana. Bantuan luar negeri umumnya tidak ditujukan untuk kepentingan politik jangka pendek melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka panjang. Program bantuan luar negeri ini biasanya menguntungkan kedua belah pihak.

Bantuan eksternal merupakan hal yang sentral terhadap peranan UE di dunia dimana Komisi Eropa (melalui ECHO) merupakan badan yang

mengelola sebagian besar dari program-program bantuan UE di seluruh dunia. UE telah membantu meningkatkan standar hidup, menciptakan pasar internasional serta melestarikan lingkungan.

Secara umum peranan dapat dilihat sebagai tugas atau kewajiban atas suatu posisi sekaligus hak atas suatu posisi, peranan memiliki sifat saling tergantung (Perwita&Yani, 2001; 30). Adapun definisi lain dari peranan menurut Soekamto dimana peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam bermasyarakat sebagai organisasi (1990: 269).

Sedangkan dalam pengertian lain konsep peranan dikemukakan sebagai berikut :

> Konsep peranan bisa dianggap sebagai definisi yang dikemukakan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum berupa keputusan, komitmen, aturan, dan tindakan yang sesuai dengan negara dalam suatu masalah atau berbagai masalah internasional (Holsti, 1987: 159).

Kehadiran Uni Eropa sebagai salah satu organisasi yang memberikan bantuan yang cukup besar sangat besar artinya bagi masyarakat Aceh khususnya dan bagi Pemerintah Indonesia kehadirannya tersebut meringankan Pemerintah Indonesia dalam proses rekonstruksi di Aceh terutama dari segi biaya. Apa yang dilakukan oleh UE dalam proses tersebut mempertegas peranan dari sebuah organisasi internasional seperti yang dikemukakan oleh T. May Rudy dalam buku Organisasi dan Administrasi Internasional, yakni :

a) Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota).
b) Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
c) Sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk

> pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, *peace keeping operation* dan lain-lain (1998: 27).

Komisi Eropa melalui sejumlah organisasi di bawahnya mendukung proses rekonstruksi di Aceh setelah bencana tsunami yang melanda wilayah itu. UE juga merupakan penyumbang dana terbesar bagi *Multi Donor Trust Fund for Aceh and North Sumatera* (MDTFANS). Kira-kira 85% dari dananya berasal dari kontribusi UE. Lebih jauh lagi, Komisi Eropa mempromosikan pembangunan ekonomi, tata pemerintahan yang baik dan peraturan perundangan di Aceh.

Seperti kita ketahui bahwa gempa dan tsunami yang melanda Aceh, 26 Desember tahun 2004 lalu menghancurkan sebagian besar wilayah pesisir Aceh. Musibah itu tak hanya merenggut ratusan ribu korban jiwa masyarakat Aceh melainkan juga menghancurkan sebagian besar insfrastruktur, pemukiman, sarana sosial seperti gedung sekolah, ekonomi dan lain-lain. Bencana itu juga mempengaruhi kondisi sosial politik masyarakat Aceh, termasuk dampak psikologisnya.

> Bencana adalah peristiwa/rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis dan di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumber dayanya (http://www.p2kp.org/web/pustaka/files/modul_pelatihan08/C/1/a/Modul-Pengelolaan-Penanganan-Bencana.pdf).

Dalam konsep penanggulangan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam ataupun non alam, terdapat tiga fase yang dilakukan dalam upaya menanggulangi suatu bencana. Yang pertama adalah fase pra-bencana, fase ini

ditujukan untuk mengurangi resiko bencana dan lebih bersifat *preventif*. Kegiatan yang bisa dilakukan pada fase ini diantaranya; pencegahan, mitigasi atau penjinakan dan kesiapsiagaan yang meliputi peringatan dini dan perencanaan. Fase kedua yaitu fase ketika terjadi bencana yang meliputi upaya; peringatan atau tanda bahaya, pengkajian darurat, rencana operasi serta tanggap darurat. Fase ketiga yaitu upaya pemulihan melalui rekonstruksi dan rehabilitasi (http://www.p2kp.org/web/pustaka/files/modul_pelatihan08/C/1/a/ Modul-Pengelolaan-Penanganan-Bencana.pdf).

Upaya tanggap darurat terhadap korban bencana tsunami di Aceh dengan segera dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Melalui Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP), para korban tsunami yang selamat dengan segera diungsikan ke daerah-daerah aman, selain itu pemerintah juga memberikan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh para pengungsi seperti makanan, air bersih, selimut dan obat-obatan.

Bencana tsunami yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera Utara ternyata sungguh berakibat fatal terutama kerusakan pada beberapa sektor kehidupan di Aceh khususnya. Sektor ekonomi termasuk sektor yang paling parah dihantam oleh tsunami. Imbas kerusakan itu terlihat pada bidang perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, pertanian dan kehutanan, perikanan dan kelautan serta ketenagakerjaan. Fase ketiga dari upaya penanggulangan bencana yakni rekonstruksi dan rehabilitasi harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia untuk membangun kembali

kehidupan masyarakat Aceh. Rekonstruksi adalah program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. rekonstruksi merupakan penuntasan dari apa yang sudah direncanakan dan dimulai dalam tahap rehabilitasi dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan yang biasa dilaksanakan (Dikutip dari: Dhani Armanto, *Mengelola Bencana, Buku Bantu Pendidikan Pengelolaan Bencana untuk Anak Usia Sekolah Dasar*, WALHI, 2006). Sedangkan menurut Sutan Rajasa dalam kamus ilmiah popular, rekonstruksi adalah penyusunan kembali menurut perilaku dan tindakan seperti semula.

Namun pemerintah Indonesia menyadari bahwa dalam proses rekonstruksi di Aceh, mereka tidak bisa mengatasinya sendiri mengingat begitu parahnya kerusakan, besarnya kerugian yang diderita serta banyaknya korban yang diakibatkan oleh bencana tsunami terbesar abad ini di Aceh. Sebagai sebuah negara yang masih berkembang, Indonesia juga memiliki keterbatasan baik dalam segi biaya ataupun waktu pemulihan.

Bantuan yang diberikan oleh UE dengan segera untuk membantu pemerintah Indonesia dalam proses rekonstruksi di Aceh merupakan langkah nyata dari keseriusan UE dalam misi kemanusiaannya. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki Indonesia sebagai sebuah negara yang masih berkembang maka bantuan tersebut sungguh begitu bernilai bagi bangsa Indonesia dan Aceh khususnya.

Melalui kerangka MDTFANS, Komisi Eropa merupakan donor terbesar bagi lembaga ini yang kemudian menjadikannya salah satu dari ketiga ketua MDTFANS. Bersama komite pengarah dari lembaga ini, Komisi Eropa memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan semua bantuan dana yang masuk melalui MDTFANS dan kemudian menyalurkannya melalui proyek-proyek yang telah ditentukan oleh rapat komite MDTFANS dalam upaya rekonstruksi di Aceh. Menurut *Project Management Institute*, "*A project is a temporary endeavor undertaken to accomplish a unique purpose*" – proyek adalah suatu usaha temporer yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal yang cukup spesifik dari karakteristik proyek adalah sifatnya yang sementara, bukan kegiatan rutin yang berulang (*repetitive)*. Dan menurut *A Guide to the Project Management Body of Knowlwdge*, proyek setidaknya dapat dilihat dan dikelola dari 9 subdisiplin pengetahuan atau manajemen yakni; manajemen lingkup pekerjaan, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen kualitas, manajemen SDM, manajemen komunikasi , manajemen resiko, manajemen *procurement* dan manajemen integrasi. Seluruh bagian disiplin ilmu ini saling terkait satu sama lain, sehingga penguasaan dan penerapannnya sangat penting artinya bagi kesuksesan proyek (http://www.swa.co.id/sekunder/kolom/manajemen/strategi/details.php?cid=2&id=69).

Dalam perkembangannya, MDTFANS telah merencanakan tujuh belas program atau proyek untuk upaya pemulihan kondisi di Aceh dan Sumatera

Utara dimana sembilan diantaranya merupakan proyek yang ditujukan untuk proses rekonstruksi di Aceh. Kesembilan proyek itu adalah :

1. Proyek Rekonstruksi Administrasi Pertanahan Aceh
2. Proyek Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pemukiman Berbasis Komunitas (RE-KOMPAK)
3. Proyek Pengangkutan Laut dan Logistik
4. Proyek Pencegahan Banjir untuk Banda Aceh
5. Fasilitas Pendanaan Rekonstruksi Infrastruktur
6. Proyek Pemeliharaan Jalan Raya Lamno-Calang
7. Bantuan Teknis bagi Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR)
8. Proyek Rekonstruksi Berbasis Sumber Daya Lokal
9. Proyek Hutan Aceh dan Lingkungan Hidup

1.4.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang tengah dihadapi dan disusun dengan mengambil premis-premis dari pengetahuan ilmiah yang sudah diketahui sebelumnya (Suriasumantri, 1996: 124-125).

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, penulis menarik sebuah hipotesis sebagai berikut :

"Jika bantuan dana yang diberikan Uni Eropa melalui *Multi Donor Trust Funds for Aceh and North Sumatera (MDTFANS)* dapat dimaksimalkan sesuai proyek yang ditentukan, maka proses rekonstruksi di Aceh pasca bencana tsunami 2004 akan berjalan dengan baik "

1.4.3 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah seperangkat prosedur yang menggambarkan aktivitas yang seharusnya dilakukan untuk mendirikan secara empiris keberadaan atau derajat suatu konsep. Melalui definisi ini, dilakukan suatu spesifikasi suatu konsep. Definisi operasional menjalankan prosedur tes yang menyediakan kriteria bagi aplikasi empiris dari konsep. Dengan demikian definisi operasional mengatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diobservasi dalam rangka membawa fenomena yang ditetapkan dalam jarak percobaan peneliti (Nachmias&Nachmias, 1981: 32).

Sesuai dengan judul yang peneliti ambil yaitu : **Peranan Uni Eropa melalui Kerangka *Multi Donor Trust Fund for Aceh and North Sumatera* (MDTFANS) dalam Membantu Proses Rekonstruksi Aceh Pasca Bencana Tsunami 2004**, maka terdapat beberapa definisi operasional yang berhubungan dengan judul tersebut, diantaranya yaitu :

1. Uni Eropa (UE) merupakan organisasi supranasional, dimana setiap negara anggotanya menyerahkan sebagian dari kedaulatannya kepada lembaga ini. Mereka bekerja keras atas dasar kepentingan bersama melalui administrasi serta kekuasaan yang berdaulat.
2. *Multi Donor Trust Fund for Aceh and North Sumatera* (MDTFANS) adalah lembaga sementara yang bertugas untuk mengkoordinasikan dana bantuan untuk Aceh dan Nias serta merencanakan program upaya pemulihan Aceh dan Nias pasca bencana tsunami.

3. Rekonstruksi adalah program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Tahapan ini merupakan penuntasan dari apa yang sudah direncanakan dan dimulai dalam tahap rehabilitasi dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan yang biasa dilaksanakan.
4. Tsunami adalah gelombang laut yang bergerak amat cepat dan disebabkan oleh adanya sentakan di lautan yang dipicu oleh gempa bumi, letusan gunung berapi atau tumbukan meteorit.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna sempit maupun luas. Dalam artian sempit, metode penelitian berhubungan dengan rancangan penelitian dan prosedur-prosedur pengumpulan data serta analisis data. Dalam artian luas, metode penelitian merupakan cara yang teratur (sistematis dan terorganisir) untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diselidiki, yang dibutuhkan sebagai solusi atas masalah tersebut (Silalahi, 1999: 6). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis analitis, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan kejadian atau keadaan masa lalu, selanjutnya kerap kali

hasilnya dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang. Dengan kata lain, metode historis analitis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Untuk menggambarkan gejala-gejala yang terjadi pada masa lalu sebagai suatu rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri, terbatas dalam kurun waktu tertentu di masa lalu.
2. Menggambarkan gejala-gejala masa lalu sebagai sebab suatu keadaan atau kejadian pada masa sekarang sebagai akibat. Data masa lalu itu dipergunakan sebagai informasi untuk menjelaskan kejadian atau keadaan masa sekarang sebagai rangkaian yang tidak terputus atau saling berhubungan satu dengan yang lain (Zulnaidi, 2007: 14).

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini mengasumsikan bahwa setiap kumpulan informasi tertulis dapat digunakan sebagai indikator sikap, nilai, dan maksud politik dengan cara menelaah secara sistematis menurut kriteria penafsiran kata dan pesan tertentu. Dengan demikian data-data yang digunakan adalah data-data sekunder yang berasal dari dokumentasi dan publikasi. Bentuk data-data tersebut dapat ditemui pada buku referensi, jurnal, majalah atau laporan dari instansi terkait, di samping pemanfaatan sumber-sumber tulisan lainnya seperti fasilitas dan jasa internet untuk mendapatkan data tertulis yang telah didokumentasikan.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati Ukur 116. Bandung.
2. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar. Bandung.
3. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit. Bandung.
4. Perpustakaan FISIP Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Jatinangor. Sumedang.
5. Perpustakaan *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Jl. Tanah Abang III/27. Jakarta.
6. Kantor Delegasi Komisi Eropa, Wisma Dharmala Sakti. Lt. 16. Jl. Jendral Sudirman 32. Jakarta.

1.6.2 Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan oleh peneliti untuk pra penelitian (tahap pengenalan, pemahaman dan pendalaman masalah) yaitu dimulai sejak bulan September 2008 dan direncanakan selesai pada bulan Februari 2009. Adapun rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan, penulis jelaskan pada tabel waktu penelitian di bawah ini.

Tabel 1.1

Tabel Waktu Penelitian

No	Aktivitas	Waktu penelitian						
		Agst 2008	Sept 2008	Okt 2008	Nov 2008	Des 2008	Jan 2009	Feb 2009
1	Pencarian data							
2	Pengajuan Judul							
3	Pembuatan Usulan Penelitian							
4	Seminar Usulan Penelitian							
5	Pengumpulan Data							
6	Bimbingan Skripsi							
7	Rencana Sidang							

1.7 Sistematika Penulisan

Peneliti mencoba menjabarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran yang terdiri dari kerangka konseptual dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II.Tinjauan Pustaka

Pada bab ini peneliti menjelaskan teori-teori yang relevan dengan subjek yang diteliti, seperti Hubungan Internasional, Kerjasama Internasional, Organisasi Internasional, Paradigma Pluralisme, Bantuan Luar Negeri, Rekonstruksi. Tinjauan pustaka ini dapat pula berisi uraian tentang data sekunder yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah atau hasil penelitian yang dapat dijadikan asumsi yang memungkinkan penalaran untuk menjawab masalah yang diajukan.

BAB III. Objek Penelitian

Dalam bab ini peneliti menjelaskan gambaran umum tentang bagaimana dampak dari tsunami terhadap wilayah Aceh. Menjelaskan gambaran umum mengenai Uni Eropa, yang terdiri dari latar belakang pembentukan, struktur organisasi dan keanggotaan; kerjasama yang dibangun antara Uni Eropa dengan Indonesia dalam menangani bencana tsunami di Aceh meliputi juga upaya-upaya yang ditempuh oleh keduanya. Serta MDTFANS sebagai lembaga sementara yang memayungi keoordinasi antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa dalam upaya pemulihan Aceh.

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini peneliti menjelaskan hasil dari proses rekonstruksi pasca bencana tsunami di Aceh yang didanai oleh Uni Eropa melalui kerangka *Multi Donor Trust Fund for Aceh and North Sumatera* (MDTFANS), meliputi juga upaya-upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dalam mendukung penuh proyek-proyek yang dicanangkan oleh MDTFANS, serta bagaimana prospek pembangunan di Aceh pasca berakhirnya masa kerja MDTFANS.

BAB V. Penutup

Dalam bab ini peneliti menjelaskan isi skripsi yang berupa kesimpulan dan saran penelitian yang dilakukan, penolakan atau penerimaan hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Kemudian akan diberikan saran-saran bagi peneliti lain yang berminat untuk melanjutkan atau mengoreksi penelitian ini.